**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan memiliki tujuan yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa perusahaan berfokus pada pencapaian keuntungan atau laba maksimal atau laba yang sebesar besarnya. Ada pula yang berpendapat bahwa perusahaan harus dapat mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosialnya. Dari semua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ingin mencapai satu tujuan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri (*value of the firm*), (Wongso, 2012). Menurut Husnan (2000), nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. (Brigham dan Gapensi, 1996) menyatakan nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham.

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah keberadaan Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014). Bahwa setiap perusahaan go *public* wajib dilaksanakan menggunakan adanya Dewan Komisaris Independen dilengkapi undang- undang peraturan pemerintah bahwa perusahaan *go* *public* memiliki Dewan Komisaris Independen.

1

Namun tentunya kita menyadari adanya komisaris yang merupakan representatif dari pemegang saham yang mungkin saja dapat mengalami benturan kepentingan sehingga diperlukan *balancing of role*, agar dapat tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham lainnya (pemegang saham minoritas). Sehingga dengan demikian, ada sejumlah persyaratan agar seorang anggota Dewan Komisaris dapat dikatakan sebagai Komisaris Independen. Persyaratan tersebut diantaranya adalah Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan. Selain itu, Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya pada perusahaan tercatat yang bersangkutan. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan. Syarat terakhir lainnya adalah Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di pasar modal.

Independen disini berarti bahwa Komisaris Independen dalam melaksanakan tugas- tugasnya adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan tidak terikat atau dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang bisa saja berbeda dengan kepentingan perusahaan. Sehingga fungsi komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, obyektif dan meningkatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai salah satu prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Perlunya Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan yaitu untuk membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan *review* atas implementasi strategi tersebut (Purwantini, 2011). Hasil penelitian Purwantini (2011), Sari dan Riduwan (2010), De Zoysa et.al (2010)

2

mengatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dewan Komisaris memiliki peranan penting dalam *Good Corporate* *Governance* (GCG). Beberapa peran dari komisaris independen yaitu (1) MengawasiDireksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam *business plan* dan memberikan nasehat kepada Direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan, (2) Memantau penerapan dan efektivitas dari praktek GCG. Agar supaya fungsi dan tugas dewan komisaris ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dewan komisaris yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan BOD sebagai “*agent*” atau bias kepada “kepentingan pemilik”. Dalam hal ini, Komisaris Independen dapat berperan dalam untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Peran ini semakin penting setelah terjadinya beberapa *white collar crime* (enron, wordcom, dsb) yang melibatkan pimpinan perusahaan pada jenjang tertinggi.

Aktifnya peranan Dewan Komisaris dalam praktek sangat tergantung pada lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus memang ada baiknya Dewan Komisaris memainkan peranan yang relatif pasif, namun di Indonesia sering terjadi anggota Dewan Komisaris bahkan sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi. Dewan Komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat menunjukkan independensinya (sehingga, dalam banyak kasus, Dewan Komisaris juga gagal untuk mewakili kepentingan

3

*stakeholders* lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas). DiIndonesia, peningkatan kebutuhan akan GCG semakin terasa setelah terjadinya krisis multidimensi sejak 1997. Diduga bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis di Indonesia adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap Direksi perusahaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Komisaris (Herwidayatno, 2000). Bahkan karena lemahnya peraturan yang ada pada waktu itu, misalnya karena tidak ada ketentuan mengenai harus adanya anggota Komisaris Independen.

Dewan Komisaris tidak saja kurang efektif dan kurang berdaya, melainkan juga turut berperan dalam pengambilan keputusan yang tidak selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, pemegang saham (terutama pemegang saham minoritas), dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat luas. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Komisaris Independen sangat diperlukan oleh suatu perusahaan..

Dewan Komisaris Independen merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasai manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksanya akuntabilitas (Sam’ani, 2008).

Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengupayakan peningkatan kualitas dari laporan keuangan. Adanya pengawasan yang baik akan meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan manajer dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan akan semakin baik dan menyebabkan investor percaya untuk menanamkan modal di perusahan tersebut. Sehingga, pada umumnya harga saham perusahaan akan lebih tinggi dan nilai perusahaan semakin meningkat.

4

Fenomena yang terkait dengan teori keagenan khususnya berhubungan dengan mekanisme *good corporate governance* dan nilai perusahaan, yaitu pasar modal Indonesia saat ini menunjukan bahwa terdapat indikasi perusahaan-perusahaan di Indonesia telah mengembangkan bebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dengan harapan dapat mengurangi masalah keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan pada pengolahan 5 (lima) sampel perusahaan manufatur terdaftar di BEI dapat dijelaskan mengenai fenomena yang berkembang di Indonesia khususnya yang terkait dengan mekanisme *good corporate governance* dan nilai perusahaan.

Tabel 1.1

Pengukuran jumlah dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur.



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DEWAN KOMISARIS |  | PBV |  |
| No. | Nama Perusahaan | Ticker | INDEPENDEN |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Charoen Pokphand | CPIN | 2 | 2 | 1 | 3.39 | 3.47 | 3.24 |
| Indonesia Tbk |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Star Petrochem Tbk | STAR | 1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.55 | 0.97 |
| 3 | Wijaya Karya Beton | WTON | 2 | 2 | 3 | 3.18 | 3.02 | 1.59 |
| 4 | Duta Pertiwi Nusantara | DPNS | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.51 | 0.44 |
| 5 | Multistrada arah sarana | MASA | 2 | 2 | 1 | 0.68 | 0.56 | 0.57 |

*Sumber: Hasil Olahan Penulis*

Tabel 1.1 di atas menggambarkan besaran nilai perusahaan yang diukur dengan *price to book value* (PBV). Kelima perusahaan yang dijadikan sebagai sampel diatas menunjukan nilai perusahaan ada yang mengalami kenaikan di tahun berikutnya seperti Star Petrochem Tbk, tetapi ada juga perusahaan yang nilai perusahaannya mengalami penurunan di tahun berikutnya, seperti Duta Pertiwi Nusantara Tbk.

5

Fenomena lain yang menarik untuk diperhatikan adalah *monitoring* oleh Dewan Komisaris Independen. Dalam rangka untuk meningkatkan transparansi perusahaan yang merupakan salah satu prinsip dalam penerapan *good corporate* *governance* diperlukan adanya keberadaan Dewan Komisaris yang dianggap lebihobjektif dalam melakukan pengambilan keputusan (Fama&Jensen,1983)

Tabel 1.1 diatas juga menunjukan jumlah Dewan Komisaris Inpenden di beberapa perusahaan yang terdaftar dalam perusahaan manufaktur. PT Multistrada Arah Sarana Tbk. mengurangi jumlah dewan komisaris independennya sebesar 50% pada tahun 2017 dan pada periode yang sama nilai perusahaannya mengalami peningkatan sebesar 1.8%, PT Star Petrochem Tbk. tidak melakukan penurunan atau peningkatan jumlah komisaris, tetapi nilai perusahaannya mengalami peningkatan yang konsisten, hal ini berbanding terbalik dengan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk yang juga tidak melakukan penurunan atau peningkatan jumlah komisaris independen, tetapi nilai perusahaannya mengalami penurunan secara konsisten. Fenomena lainnya dapat dilihat pada Wijaya Karya Beton Tbk, perusahaan ini melakukan peningkatan jumlah dewan komisaris pada tahun 2017 sebesar 33%, tetapi dapat dilihat pada periode yang sama nilai perusahaannya mengalami penurunan sebesar 47%.

Fenomena-fenomena ini menggambarkan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan akan berdampak pada nilai perusahaan yang dimana fenomena ini akan dikaitkan dengan mekanisme dewan komisaris independen*. Good Corporate Governance* dikenal oleh masyarakat luas sebagai struktur dan sistem pengelolaan perusahaan yang baik, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi, beberapa penelitian yang bersifat akademi telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara

6

struktur dan mekanisme *corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan

(Young, 2003). Dengan demikian pengaruh dari dewan komisaris independen

terhadap nilai perusahaan menunjukan hasil yang simpang siur.

Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam membandingkan hasil-hasil

penelitian yang menguji dampak dari dewan komisaris independen terhadap kinerja

atau nilai perusahaan maka disajikan dalam Tabel 1.2 berikut:

TABEL 1.2

Ringkasan *Research Gap* Tentang Pengaruh Dewan Komisaris Independen

Terhadap Nilai Perusahaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GAP | HASIL | PENELITI | OBJEK PENELITIAN |
|  |  | ▪ Raja Aldino (2015) | ▪ Perusahaan Manufaktur |
|  |  | ▪ Apri Dwi Astuti (2017) | ▪ LQ 45 |
|  | Menemukan |  | ▪ Perusahaan yang terdaftar di |
|  | ▪ Reny dan Retno (2012) | BEI |
|  | bukti bahwa |
|  | ▪ Dharmapala dan Khanna | ▪ Perusahaan di Bursa Efek |
|  | Dewan |
|  | (2008) | India |
|  | Komisaris |
|  | ▪ Garay dan González |  |
| Terdapat | Independen |  |
| (2008) | ▪ Perusahaan di Venezuela |
| perbedaan | berpengaruh |
| ▪ Silveira dan Barros | ▪ Perusahaan di Bursa Efek |
| temuan | positif dan |
| (2007) | Brazil |
| hasil | signifikan |
| ▪ Chhaochharia dan | ▪ Perusahaan di Bursa Efek US |
| penelitian | terhadap Nilai |
| Grinstein (2006) | (CRSP) |
| tentang; | Perusahaan |
|  | ▪ Perusahaan di Bursa Efek |
| Pengaruh |  |  |
|  | ▪ Black et al. (2002) | Korea |
| Dewan |  |
|  | ▪ Yofni (2016) | ▪ PT. Astra Internasional Tbk. |
| Komisaris |  |
| Independen | Menemukan | ▪ Laurensia Chintia Dwi | ▪ Perusahaan Industri Barang |
| terhadap | bukti bahwa | (2014) | Konsumsi |
| Nilai | Dewan |  | ▪ The Indonesia Most Trusted |
| Perusahaan. | Komisaris | ▪ Suklimah Ratih (2011) | Company - CGPI |
|  | Independen |  | ▪ Perusahaan di Bursa Efek |
|  | berpengaruh | ▪ Tang (2007) | Jepang |
|  | negatif atau |  | ▪ Perusahaan pada Karachi |
|  | tidak | ▪ Javed dan Iqbal (2007) | Stock Exchange |
|  | berpengaruh |  |  |
|  | terhadap Nilai | ▪ Bøhren dan Ødegaard | ▪ Perusahaan pada Oslo Stock |
|  | Perusahaan | (2004) | Exchange |

Sumber : Hasil olahan penulis

7

Praktek Dewan Komisaris Independen memiliki hubungan yang signifikan terhadap *earnings management* seperti penelitian yang dilakukan Watfield et al 1995, Gabrielsen et al 1997, Wedari 2004. Sedangkan menurut Siregar dan Bachtiar 2004; Darmawati 2003, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Dewan Komisaris Independen terhadap *earnings management*. Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya perilaku opportunistik manajemen akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan kepada para pemakainya seperti para investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan berkurang.

Herawaty (2008) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang mengadakan Dewan Komisaris Independen diyakini akan membatasi pengelolaan laba yang *oportunis.* Oleh sebab itu, semakin tinggi kualitas audit, semakin tinggi proporsikomisaris independen, kepemilikan manajerial, semakin kecil kemungkinan *earnings management* dilakukan. Hubungan negatif antara Dewan KomisarisIndependen dan *earnings management* ini dapat memperlemah pengaruh antara *earnings management* dan nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memutuskan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh perilaku oportunistik manajer perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017, dimana sektor manufaktur dibagi menjadi sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi, dan masing-masing sektor memiliki subsektor, sehingga total perusahaan yang akan kami teliti adalah 121 perusahaan.

8

1. **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut:

* 1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan?
	2. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap perilaku oportunistik manajer?
	3. Bagaimana pengaruh perilaku oportunistik manajer terhadap nilai perusahaan?
	4. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh perilaku oportunistik manajer?
1. **Batasan Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

* 1. Peneliti melakukan studi kasus terhadap perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)
	2. Periode data yang digunakan adalah tahun 2015-2017.
	3. Data perusahaan yang digunakan adalah pada laporan keuangan *historical*

yang sudah di audit dan di publikasikan sejak perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia

9

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah ***“Bagaimana pengaruh*** ***dewan*** ***komisaris independen terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh perilaku oportunistik manajer pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017?”***

1. **Tujuan Penelitian**
	1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
	2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap perilaku oportunistik manajer
	3. Untuk mengetahui pengaruh perilaku oportunistik manajer terhadap nilai perusahaan
	4. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh perilaku oportunistik manajer
2. **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

* + 1. Bagi Regulator atau Pemerintah, Hasil penelitian ini dapat berimplikasi pada regulasi di pasar modal maupun pemerintah dalam peningkatan efektivitas dewan komisaris dan nilai saham perusahaan di pasar modal. Dengan motif untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka pemerintah dapat membuat regulasi tentang pengawasan dewan komisaris, sehingga peningkatan nilai perusahaan dapat maksimal.

10

1. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan berinvestasi, investor dapat mengetahui apakah dewan komisaris independen dapat meningkatkan nilai perusahaan.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna mengenai dewan komisaris independen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan

11